

**Jangan Kepagian Jika Siang Dimakan**  
**Pemkot Balikpapan Wanti-wanti Pengantaran MBG**  
**Samarinda Alokasikan 6,5 Persen dari APBD 2025**



*Sumber gambar: Kaltim Post*

*Kamis, 09/01/2025*

Tahap awal program Makan Bergizi Gratis di Balikpapan akan dimulai dari Kecamatan Balikpapan Selatan. Pemerintah menyiapkan menu bervariasi dengan anggaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per siswa menyesuaikan jenjang pendidikan.

**BALIKPAPAN** - Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan di Balikpapan bukan lagi uji coba melainkan implementasi langsung pemerintah pusat. "Anggaran secara nasional sudah ada lewat Badan Gizi Nasional (BGN). Semua menggunakan dana pemerintah pusat," kata Sekretaris Kota Balikpapan Muhaimin kepada Kaltim Post, Rabu (8/1).

Termasuk catering kata dia, juga ditunjuk BGN dan bukan kewenangan pemerintah daerah. Muhaimin menyebutkan dari informasi yang diterima ada tiga catering yang ditugaskan menyediakan MBG.

Salah satunya memiliki perizinan dari Samarinda. "Tahap awal untuk sekolah di Balikpapan Selatan dulu jenjang PAUD hingga SMA/SMK," tuturnya.

Sementara untuk pilihan lauk menggunakan tiga jenis opsi yakni telur, ikan, dan ayam. Muhaimin meminta Disdikbud Balikpapan mengecek peserta didik yang memiliki alergi terhadap tiga jenis lauk tersebut sehingga bisa dilakukan antisipasi selama distribusi. Dirinya berpesan, makanan yang dikirim tetap sesuai dengan kondisi anak di sekolah. Adapun keputusan dari BGN, paket menu makan ini memiliki variasi harga. Artinya tidak semua jenjang mendapatkan biaya yang sama.

"Harga menu makanan untuk siswa TK dan SD sebesar Rp8 ribu per anak. Ini hanya untuk biaya pangan atau isi menu saja," ungkapnya. Jadi tidak termasuk dengan biaya jasa catering. Sementara untuk siswa SMP dan SMA/SMK harga menu makanan dianggarkan sebesar Rp10 ribu per anak. Dia menerangkan distribusi makan juga tidak satu waktu melainkan berbeda-beda antar jenjang pendidikan. "Ada yang pukul 07.45 Wita, pukul 10.00 Wita, dan ada yang saat makan siang tergantung dari kondisi pembelajaran sekolah," imbuhnya.

Misalnya TK dan SD distribusi makanan pagi hari. "Karena jangan sampai anak-anak baru makan siang tapi sudah diantar dari pagi jadi kelayakan makanan tetap terukur," ujarnya. Muhaimin menjelaskan BGN menggandeng Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk pelaksanaan MBG. Mereka mendampingi katering selama distribusi makanan ke sekolah.

SPPI direkrut bertahap pemerintah pusat, sementara yang tiba saat ini baru tahap pertama. Pihaknya belum mengetahui berapa lama kontrak berjalan. "Kalau MBG seharusnya selama satu Tahun Anggaran 2025," ucapnya. Namun, dia memastikan program akan berjalan menyeluruh secara bertahap menyasar ke kecamatan lain.

## **PROGRAM TERTUNDA**

Dalam rapat yang digelar kemarin sore, Muhaimin mengatakan secara nasional program MBG seharusnya berjalan 6 Januari. Khusus Balikpapan tertunda karena BGN baru koordinasi dengan Disdikbud Balikpapan untuk teknis kegiatan, "Jadi terlambat karena persiapan BGN belum klir dengan katering dan Disdikbud," katanya. Dalam pertemuan tersebut pihaknya bertanya tentang persiapan pelaksanaan.

Seperti katering yang ditunjuk, lokasi *workshop*, ahli gizi, cara pengolahan makan, distribusi makan, dan kelayakan menu. "Kami sepakat katering yang ditunjuk BGN bersama SPPI akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) terlebih dulu," bebernya. Khususnya untuk mengetahui lokasi *workshop*, memastikan ahli gizi sesuai standar, higienitas, sertifikasi, dan persiapan lainnya. Dia berharap DKK Balikpapan sudah mulai berkoordinasi lebih lanjut dengan katering dan perwakilan BGN secepatnya.

Jika semua persiapan sudah rampung nanti baru disampaikan kepada Disdikbud Balikpapan selaku penerima manfaat. Selanjutnya berkoordinasi dengan sekolah yang menjadi sasaran. "Kalau semua sudah siap baru kita laksanakan MBG di Balikpapan Selatan dulu," sebutnya. Namun kapan kepastian bisa mulai program MBG tergantung kesiapan pihak-pihak yang terlibat dalam teknis.

Muhaimin mengatakan Pemkot Balikpapan sangat mendukung program MBG untuk membantu mencerdaskan anak-anak. Namun dia menekankan, saat pelaksanaan tidak ada masalah baik dari sisi penyedia, gizi menu, higienitas makanan, hingga distribusi ke siswa. Untuk diketahui, rencananya MBG berlangsung mulai 13 Januari di Balikpapan. Dikonfirmasi terpisah, meski pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat dilakukan melalui BGN, Dinas Kesehatan mengemban tugas krusial dalam pengawasan di daerah. Ada banyak persiapan sebelum program makan siang berjalan. Ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Mulai dari memastikan penyedia jasa atau katering sudah memiliki izin kemudian ketersediaan tenaga ahli, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan. Termasuk pemeriksaan wilayah tempat produksi makan siang tersebut.

"Kami memastikan tenaga penjamah makanan memenuhi persyaratan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Alwiati kemarin. Tak hanya itu ada banyak elemen lain yang perlu menjadi perhatian seperti proses pengolahan limbah, cara produksi, dan pemilihan bahan pangan untuk menu MBG. "Walau *budget* harga Rp10 ribu tetap harus terjamin kualitasnya untuk anak-anak," imbuhnya.

Alwi membeberkan pihaknya kini menunggu daftar menu makanan yang disediakan catering. Opsi apa saja yang memenuhi biaya tersebut. "Usulan menu nanti kami lihat, besok diskusi lagi sama catering," tuturnya. Dia menekankan daftar menu tetap harus memenuhi standar persyaratan gizi di antaranya menghitung kebutuhan protein, karbohidrat, kalori yang berasal dari sayur sampai buah harus tersedia. DKK Balikpapan akan mengawasi dari persiapan sampai nanti pelaksanaan setiap hari. "Ada tim yang turun langsung melihat teknis selama konsumsi jadi ini termasuk PR besar," jelasnya.

Pada bagian lain, sama seperti di Balikpapan program MBG di Samarinda dijadwalkan dimulai pada 13 Januari 2025. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun setelah menggelar pertemuan dengan perwakilan BGN. Andi Harun menjelaskan, audiensi dengan BGN membahas aspek teknis pelaksanaan program MBG. Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan penuh termasuk menyiapkan anggaran sebesar 6,5 persen dari APBD 2025 untuk menjamin kelancaran program Makan Siang Gratis ini.

"Pembahasan dengan BGN mencakup teknis di lapangan mulai dari dapur, pengelolaan, hingga pengangkutan makanan," ujarnya Rabu (8/1). Untuk saat ini, sebut dia, tiga dapur telah siap mendukung pelaksanaan program. Lokasinya di Jalan Suryanata, Jalan Pangeran Antasari, dan Jalan Wahid Hasyim II. Nantinya setiap dapur diharapkan bisa melayani hingga 3.000 siswa di wilayahnya.

Namun, Andi Harun mengungkapkan bahwa jumlah dapur tersebut masih belum mencukupi mengingat kebutuhan ideal di Samarinda adalah sembilan dapur untuk melayani seluruh penerima manfaat. "Kami siap mendukung program ini termasuk menutupi kekurangan anggaran jika diperlukan. Karena sifatnya program nasional, pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan mendesak atau program strategis daerah," tegasnya.

Selain itu, pelaksanaan program MBG di Samarinda akan melibatkan berbagai pihak termasuk TNI dan Polri untuk memastikan distribusi berjalan lancar. "Intinya dengan program ini kita semua akan turun tangan semua untuk menyukkseskan," jelasnya. **(gel/eko/riz)**

### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Jangan Kepagian Jika Siang Dimakan, Pemkot Balikpapan Wanti-wanti Pengantaran MBG, Samarinda Alokasikan 6,5 Persen dari APBD 2025, 09/01/25

### **Catatan**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), badan gizi nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
2. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres 83/2024 diatur bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi badan gizi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:

- a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
  - b. anak usia di bawah lima tahun;
  - c. ibu hamil; dan
  - d. ibu menyusui.
3. Dalam Pasal 41 Perpres 83/2024 diatur bahwa setiap unsur di lingkungan badan gizi nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan badan gizi nasional maupun dalam hubungan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lain terkait.
  4. Diatur dalam Pasal 52 Perpres 83/2024, pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
    - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
    - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.